



GANDENG 21 LEMBAGA DAN ORGANISASI **Layanan Bantuan Hukum Gratis Kembali Digulirkan**

YOGYA (KR) - Program pemberian layanan bantuan hukum secara gratis yang diberikan oleh Pemkot Yogya kembali digulirkan untuk tahun ini. Total ada 21 lembaga atau organisasi bantuan hukum yang berhasil digandeng untuk memberikan layanan sepanjang tahun ini.

Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Yogya Saverius Vanny Noviantri, mengungkapkan bantuan hukum gratis itu khusus bagi masyarakat kategori miskin. "Layanan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Yogya terkait pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum," tandasnya, Kamis (18/1).

Sepanjang tahun 2023 lalu terdapat 22 lembaga atau organisasi bantuan hukum yang menjadi mitra Pemkot. Sedangkan tahun ini hanya 21 lembaga dan organisasi bantuan hukum yang melan-

jutkan program tersebut. Meski berkurang satu lembaga namun tidak akan mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Vanny menyebut pada tahun lalu total ada 55 perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum gratis tersebut. Mayoritas ialah perkara hukum litigasi atau perkara yang diselesaikan melalui persidangan baik pidana, perdata maupun tata usaha negara. "Untuk non litigasi seperti bantuan di luar peradilan tapi tidak melulu soal perkara misalnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, bisa juga mediasi, atau negosiasi dan juga drafting dokumen hukum juga diberikan. Namun untuk jumlah kasus yang masuk bisa dikatakan perdata yang lebih dominan," imbuhnya.

Kendati demikian, tidak semua perkara hukum bisa mendapatkan layanan bantuan secara gratis. Terutama bagi tindak pidana makar,

kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Sementara untuk mendapatkan layanan tersebut pihak yang berperkara harus masuk kategori keluarga tidak mampu. Terutama masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS), kartu indonesia pintar, kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera, atau kartu jaminan kesehatan khusus. Selain itu juga bisa menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan harus diketahui oleh pejabat penegak hukum.

"Bisa langsung menghubungi lembaga atau organisasi bantuan hukum maupun datang ke Bagian Hukum Setda Kota Yogya," tandasnya.

Dirinya menambahkan, Pemkot Yogya sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 250 juta untuk program bantuan hukum gratis. Akan tetapi pada tahun 2023 lalu anggaran tersebut hanya terserap 50 persen dari total keseluruhan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005